

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntansi sektor publik telah mengalami pengembangan yang sangat pesat. Saat ini perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh pemerintah, perusahaan milik negara/daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya, dibandingkan dengan pada masa-masa sebelumnya karena adanya tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik (Mardismo, 2002)

Dalam era keterbukaan seperti ini, seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good government*) telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik (Nazaruddin dkk, 2014). Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya

adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2002).

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 59 Tahun 2007 disebutkan, bahwa untuk tujuan akuntabilitas atas pengelolaan dana-dana yang dikelola oleh provinsi atau kabupaten/kota diwajibkan oleh kepala daerah dalam hal ini adalah gubernur dan bupati/walikota yang meliputi neraca daerah, laporan perhitungan APBD, nota perhitungan APBD dan laporan arus kas (Eriva dkk, 2013).

Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah suatu standar prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan baik pusat maupun daerah. Sehingga dengan adanya standar akuntansi ini maka setiap laporan keuangan pemerintah harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (Sartika, 2015).

★ Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan gabungan dari Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pemerintah daerah selama satu periode pelaporan (Erlina dan Rasdianto, 2013:20). LKPD digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pemerintahan daerah (Earlina dan Rasdianto, 2013:20).

Menurut Bastian (2010), setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Terkait hal tersebut maka, setiap pengelolaan keuangan harus memiliki pemahaman yang baik mengenai laporan keuangan sehingga

laporan yang dipublikasikan dapat disajikan secara wajar terbebas dari salah saji yang material, sehingga tidak menyesatkan pembaca dan pengguna laporan (Mahmudi, 2010). Tanpa pemahaman laporan keuangan yang baik mengakibatkan laporan keuangan yang dipublikasikan terdapat kesalahan material dalam penyajian angka, tidak sesuai dengan pelaporan dan tidak tepat waktu dalam penyampaiannya sehingga berdampak buruk bagi pengguna laporan keuangan dan pihak penyaji laporan itu sendiri (Mahmudi, 2010).

Dalam pengelolaan keuangan yang baik, setiap SKPD harus memiliki sumber daya manusia (staf pengelola) yang kompeten dan memiliki pengetahuan yang dicerminkan dari latar belakang pendidikannya, dalam hal ini sumber daya manusia harus benar-benar mengerti tentang akuntansi melalui pendidikan maupun pelatihan agar terciptanya laporan keuangan yang memiliki kualitas informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. Pengetahuan pengelolaan merupakan faktor dari kualitas laporan keuangan, untuk memperoleh kualitas laporan yang berkualitas, pemerintah harus mempunyai staf pengelola yang memiliki pengetahuan dalam pengelolaan laporan. Pengetahuan pengelolaan adalah ilmu dan kemampuan dalam menjelaskan interaksi antara orang dan sistem serta implementasi sistem dan merupakan faktor penting yang mempengaruhi kualitas dari sebuah informasi. Keandalan sistem harus juga didukung keandalan staf pengelola. Namun pengelolaan laporan yang telah

dilakukan harus sesuai standar akuntansi pemerintah agar dapat menyusun laporan dengan andal (Romilia, 2011).

Menurut Moenir (1992-119) sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Ketersediaan sarana prasarana dapat membantu tugas para pegawai dan mempermudah suatu pekerjaan agar dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik apabila sarana dan prasarana tidak tersedia, maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan mencapai hasil yang diharapkan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang tepat akan mendukung terwujudnya standar akuntansi pemerintah sehingga akan berjalan dengan efektif.

Fenomena yang terjadi saat ini yaitu menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kabupaten Cilacap tahun 2015 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dikarenakan asset yang menjadi salah satu penyebab terganjalnya Cilacap meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan saat ini sudah bisa teratasi. Sehingga Cilacap mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pertama kalinya terhadap LKPD tahun 2016. Menurut Sutarjo mendapat opini WTP merupakan perjuangan dari Pemkab

Cilacap, karena harus menginventaris dan menuangkan dalam bentuk neraca tentang nilai asset secara keseluruhan (www.satelitpost.com).

Kabupaten Cilacap menerima hasil opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak tiga kali berturut-turut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2016-2018 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini sejalan dengan apa yang dilakukan pemerintahan di Kabupaten Cilacap untuk mengupayakan adanya pendampingan dari pihak BPK Provinsi Jawa Tengah agar Kabupaten Cilacap mendapatkan hasil opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (www.cilacapkab.go.id).

Laporan keuangan daerah merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan (Baridwan, 2000:17). Pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh terbatasnya sumber daya manusia yang menguasai dan memahami tentang ilmu akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Desiana (2014:17) laporan keuangan adalah produk yang dihasilkan oleh disiplin ilmu akuntansi, sehingga untuk menghasilkan laporan keuangan diperlukan orang-orang yang berkompeten. Maka dari itu, dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas (Desiana, 2014:17).

Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kusumah (2012) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian Adhi dan Suhardjo (2013) menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian Wati, dkk (2014) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sartika (2015) menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian menurut Inapty dan Martiningsih (2016) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Penelitian Nopianti (2017) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Sako dan Lantowa (2018) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas penyajian laporan keuangan. Penelitian Wisaksono (2018) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya penelitian Syahrani (2018) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Sartika (2015) menunjukkan bahwa pengetahuan pengelolaan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Syahrani (2018) menunjukkan bahwa pengetahuan pengelolaan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Sartika (2015) menunjukkan bahwa ketersediaan sarana prasarana tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Syahrani (2018) menunjukkan bahwa ketersediaan sarana prasarana berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Dewi Sartika (2015) dengan judul pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengetahuan pengelolaan dan ketersediaan sarana prasarana terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Alasan mengapa replikasi karena adanya hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten dari variabel (X3) ketersediaan sarana prasarana, yaitu Dewi Sartika (2015) yang hasilnya ketersediaan sarana prasarana tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan penelitian yang dilakukan Febby Syahrani (2018) menunjukkan hasil bahwa ketersediaan sarana prasarana berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin meneliti kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena masih terdapatnya perbedaan

hasil temuan dari peneliti sebelumnya, sehingga perlu diuji ulang dengan maksud untuk mendapatkan konsistensi dari variabel yang digunakan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Dewi Sartika (2015) yaitu dalam penelitian ini peneliti lebih fokus terhadap tiga faktor dari laporan keuangan itu sendiri yang dianggap dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan, seperti penerapan standar akuntansi pemerintah, pengetahuan pengelolaan dan ketersediaan sarana prasarana. Penelitian ini mengambil objek penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, yakni dengan mengambil objek penelitian di Kabupaten Cilacap dan penelitian sebelumnya mengambil objek penelitian di Kuantan Singingi. Periode penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu juga berbeda. Penelitian saat ini menggunakan periode 2019 sedangkan penelitian terdahulu menggunakan periode 2015.

Alasan memilih objek penelitian pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap yaitu peneliti ingin meneliti mengenai hasil opini audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Cilacap yang dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah tiga kali berturut-turut. Apakah hal tersebut dipengaruhi oleh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengetahuan pengelolaan dan ketersediaan sarana prasarana oleh jajaran aparatur pemda Kabupaten Banyumas. Sebab itulah penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Pengetahuan Pengelolaan dan Ketersediaan

Sarana Prasarana Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan diantaranya sebagai berikut :

1. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
2. Apakah pengetahuan pengelolaan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?
3. Apakah ketersediaan sarana prasarana berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menguji pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Menguji pengaruh pengetahuan pengelolaan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Menguji pengaruh ketersediaan sarana prasarana terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak antara lain :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan ilmu peneliti mengenai pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pengetahuan Pengelolaan dan Ketersediaan Sarana Prasarana terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Bagi Pemerintah atau instansi yang bersangkutan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pertimbangan untuk membantu kinerja dan keputusan pemerintah daerah sehingga kualitas laporan keuangan pemerintah daerah bisa tetap maksimal dan tetap mendapat opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan pengetahuan pembaca dalam bidang akuntansi sektor publik (kualitas laporan keuangan pemerintah daerah) dan juga dapat dijadikan sebagai materi tambahan untuk penelitian selanjutnya, khususnya bagi yang berminat untuk melakukan penelitian dalam bidang ini.